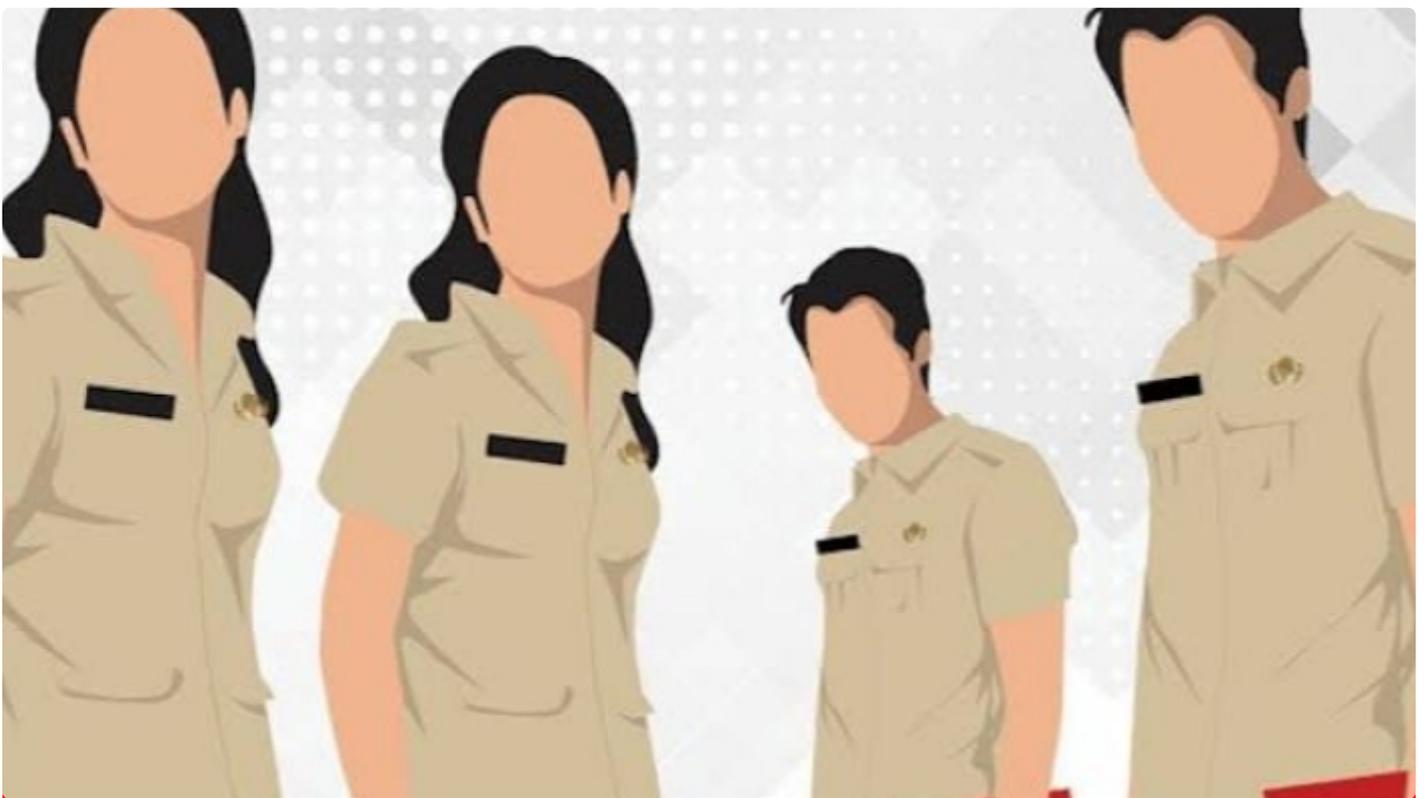




TPP ASN di Toraja Utara 2 Bulan Tidak Terbayar, Anggaran DAU Digunakan Bayar Kegiatan Fisik

SULSEL INDONESIA SATU - TORAJAUTARA.GARDAMEDIA.ID

Jan 14, 2023 - 18:01



Ilustrasi Pegawai Pemerintah atau ASN

TORAJA UTARA - Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Toraja Utara di tahun 2022 diketahui tidak terealisasi selama 2 bulan, Sabtu (14/1/2023).

Hal ini diketahui langsung dari curhatan puluhan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di akhir tahun 2022.

Para PNS pemerintah Toraja Utara itu menyebutkan bahwa TPP mereka hanya terbayar hingga bulan Oktober 2022 saja dan untuk bulan November dan Desember sudah tidak terbayarkan.

Dari beberapa PNS pemerintah Toraja Utara juga diketahui jika TPP bulan

Oktober tersebut mereka terima masuk ke rekening di tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23:00 Wita.

Terkait persoalan ini, saat dikonfirmasi langsung di ruangnya pada hari Rabu (11/1/2023), selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah, Irmawati Patandung, menjelaskan jika TPP tidak terbayar 12 bulan karena dalam postur anggaran induk APBD hanya dianggarkan 9 bulan saja.

"Karena pada saat kita menunggu persetujuan dari kementerian keuangan setelah kita bersurat ke kemendagri dan disetujui, tapi dari kementerian keuangan tidak memberikan pertimbangan. Kemendagri melihat bahwa kita berusaha mencukupkan 3 bulan TPP ini yang seharusnya 12 bulan di penganggaran awal", ungkap Irmawati.

NAMA DAERAH	DANA BAGI HASIL								TOTAL DBH	DANA ALOKASI UMUM
	DBH PAJAK			DBH SUMBER DAYA ALAM						
	PPH	PBB	CHT	KEHUTANAN	MIGAS	MINERBA	PERIKANAN	PANAS BUMI		
Cab. Jeneponto	6.474.734	4.914.715		33.337	702.666	3.038.168	1.918.826		17.082.446	604.867.921
Cab. Luwu	5.377.855	4.700.544		33.662	702.666	3.557.927	1.918.826		16.291.480	647.617.174
Cab. Luwu Utara	5.095.023	5.402.804		33.337	702.666	3.772.391	1.918.826		16.925.047	617.420.659
Cab. Maros	9.827.346	7.574.147		40.027	702.666	3.057.640	1.918.826		23.120.652	660.026.786
Cab. Pangkajene dan Kepulauan	10.428.957	10.340.146		33.647	702.666	3.128.757	1.918.826		26.552.999	702.238.532
Cota Palopo	7.184.728	4.117.558		33.337	702.666	3.038.168	1.918.826		16.995.283	487.717.402
Cab. Luwu Timur	13.846.509	23.286.562		578.087	702.666	73.745.011	1.918.826		114.077.661	503.126.813
Cab. Pinrang	6.035.840	4.657.322		36.906	702.666	3.038.168	1.918.826		16.389.728	661.435.610
Cab. Sinjai	5.369.943	4.365.836		37.505	702.666	3.040.855	1.918.826		15.435.631	542.287.308
Cab. Kepulauan Selayar	4.550.028	4.535.774		35.194	702.666	3.038.168	1.918.826		14.780.656	560.595.329
Cab. Sidenreng Rappang	5.851.713	4.619.670		36.157	702.666	3.038.168	1.918.826		16.167.200	575.549.310
Cab. Soppeng	5.476.426	4.514.261		37.679	702.666	3.040.635	1.918.826		15.690.493	579.187.870
Cab. Takalar	5.500.570	6.467.480		33.337	702.666	3.038.168	1.918.826		17.661.047	564.934.568
Cab. Tana Toraja	5.181.336	4.526.740		40.018	702.666	3.101.545	1.918.826		15.471.131	537.324.447
Cab. Wajo	7.018.989	17.567.668		35.384	16.161.214	3.038.168	1.918.826		45.740.249	668.126.385
Cota Pare Pare	7.891.132	4.096.630		33.337	702.666	3.038.168	1.918.826		17.680.759	429.881.874
Kota Makassar	95.153.342	5.794.772		112.128	702.666	3.038.168	1.918.826		106.719.902	1.257.670.897
Cab. Toraja Utara	4.867.022	4.452.280		35.165	702.666	3.048.308	1.918.826		15.024.267	498.503.368
Provinsi Sulawesi Tenggara	35.532.417	16.685.858	2.614	3.754.832		144.680.075			200.655.796	1.456.620.465
Cab. Buton	1.968.068	4.405.949		65.621		18.952.908	1.918.826		27.311.372	395.460.748
Cab. Konawe	2.692.474	7.379.089		273.891		20.530.120	1.918.826		32.794.400	654.840.854
Cab. Kolaka	6.912.965	16.476.772		94.606		99.197.038	1.918.826		124.600.207	542.631.257
Cab. Muna	2.811.708	4.476.631		75.766		17.803.347	1.918.826		27.086.278	611.804.752

Lanjut kata Irmawati, seandainya teman di biro bagian organisasi sekalian tidak usah bersurat ke sana maka pada saat itu kami akan selesaikan sampai Oktober, November.

Irmawati Patandung juga menjelaskan jika pada saat injuri time, akhir tahun semua tagihan masuk dan tidak mungkin menunggu persetujuan kementerian keuangan.

"Masa kita mau menunggu persetujuan dari sana sementara tagihan sudah menumpuk. Gak mungkin kami tunggu sementara ada yang perlu kita selesaikan dengan sumber dana yang sama, sumber dana DAU makanya yang 2 bulan tidak cair", beber Irmawati.

Seandainya di APBD kita pendapatan 100% belanja 100% tapi ini pendapatan hanya 50% sementara harus membiayai 100% kegiatan maka pasti ada kegiatan yang tidak terealisasi, tambahnya.

Irmawati, juga menuturkan jika pembiayaan DAU itu yang wajib dibiayai adalah gaji dan tunjangan yang melekat di gaji, bukan TPP.

Untuk itu selaku Kepala BPKAD, Irmawati Patandung mengatakan bahwa Pada PP 12 tahun 2019, pasal 58 dikatakan pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan perbaikan penghasilan sesuai kemampuan daerah setelah mendapat persetujuan dari kementerian keuangan.

Secara rinci dan jelas Irmawati Patandung, mengatakan jika pada anggaran induk hanya 9 bulan dianggarkan TPP dan pada saat injuri time keluar surat persetujuan dari kemendagri tapi di situ kementerian keuangan tidak memberikan pertimbangan sehingga pada akhir tahun tersebut banyak tagihan menumpuk masuk seperti fisik dan biaya rutin dari OPD dan Kecamatan yang harus dibayarkan.

Namun saat ditanyakan lanjut akan adanya pembayaran TPP untuk bulan 10 yang diterima para ASN pada tanggal 31 Desember 2022, kepala BPKAD Toraja Utara pun menerangkan kalau itu anggarannya diambilkan dari PAD dan DBH.

Sementara penjelasan Salvius Pasang, selaku Kepala Sekretariat Daerah Toraja Utara, bahwa adanya pembayaran TPP untuk bulan 10 (Oktober), itu ada pergeseran anggaran dari uang makan pegawai bulan Juli sampai Desember.

Dari penjelasan Kepala BPKAD Toraja Utara juga diketahui jika total TPP di 2022 jika dicukupkan 12 bulan berkisar 54 Milyar.

Dan untuk diketahui juga jika Rincian Transferan DAU Tahun Anggaran 2022 ke kabupaten Toraja Utara adalah Rp.498.503.368.000.

(Widian)